

Judul : Kisah Amsal Sitepu, Nasib Pekerja Industri Kreatif di Ujung Palu Hakim
Tanggal : Rabu, 01 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 11

PROSES HUKUM

Kisah Amsal Sitepu, Nasib Pekerja Industri Kreatif di Ujung Palu Hakim

Nikson Sinaga

Setelah mendapat dukungan publik, pekerja industri kreatif Amsal Sitepu (34) akhirnya bisa mengharap udara bebas. Amsal yang ditahan sebagai terdakwa korupsi pembuatan video profil desa ditangguhkan pembuatannya sehari menjelang pembacaan vonis. Kasus Amsal menjadi momentum dakwaan untuk memberi ruang bagi industri ekonomi kreatif bagi anak muda.

Kebekuan saya hari ini biarlah menjadi kebelakangan bagi para pekerja industri kreatif yang ada di seluruh Indonesia. Saya sudah 131 hari ditahan," kata Amsal setelah keluar dari Rumah Tahanan Kelas I Medan, Sumatera Utara, Selasa (31/3/2026) sore.

Amsal adalah pekerja industri ekonomi kreatif yang sehari-hari beraktivitas di Kabupaten Karo, Sumut. Dia telah membuat sebanyak 23 video profil desa di Karo. Video profil desa hasil karyanya bisa dilihat di berbagai media digital, antara lain di kanal YouTube.

Video yang rata-rata berdurasi sekitar 11 menit itu mempromosikan perekonomian desa seperti hasil pertanian, pariwisata, sejarah, keberagaman, dan kehidupan sosial masyarakatnya.

Bersama timnya yang merupakan anak-anak muda yang tergabung dalam G2 Promiseland, Amsal memotret desa-desa di dataran tinggi Karo dari berbagai perspektif menarik. Mereka merekam aktivitas pertanian, tradisi, budaya, dan pariwisata dengan berbagai ide kreatif. Mereka, antara lain, membuat video profil Desa Perbuji, Perbesi, Sukatepu, Kuala Tanggul, dan Sibang-Garang.

Amsal dan tim sehari-hari juga bekerja sebagai videografer dan fotografer pernikahan serta acara-acara di Karo dan sekitarnya. Mereka juga membuat video profil sejumlah perusahaan.

Namun, kerja-kerja Amsal di bidang ekonomi kreatif berhenti sejak dia dijerat kasus korupsi pada akhir 2025.

Kasus itu bermula ketika Amsal menawarkan proposal pembuatan video profil desa

kepada sejumlah kepala desa di Karo dalam kurun 2020-2022. Amsal pun mendapat proyek pengerjaan 23 video profil desa. Dia menyelesaikan pembuatan semua video profil desa yang sudah disepakati sesuai proposal. Pembiayaannya ditanggung oleh desa masing-masing.

Setelah beberapa tahun berlalu, Kejaksaan Negeri Karo menetapkan Amsal sebagai tersangka kasus korupsi pembuatan 20 video profil desa yang dikerjakan dengan total anggaran Rp 600 juta atau Rp 30 juta per video.

Menurut jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Karo, Wira Arizono, Amsal menagih biaya pembuatan video lebih tinggi dari seharusnya Rp 24,1 juta. Negara di-selanjutnya menagih Rp 202 juta.

Dalam RAR, Amsal mengajukan 12 *over* biaya pembuatan satu video yang ter-bagi dalam empat kelompok anggaran, yakni sebelum produksi, sewa peralatan, jurnis kamera dan personel, serta tahap akhir (*finishing*). Ia, antara lain, mengajukan biaya konsep dan ide Rp 2 juta, skrip video Rp 2 juta, dan *over* konsep Rp 2 juta. Dia juga mengajukan sewa tiga kamera DSLR untuk 30 hari total Rp 1,8 juta, sewa satu kamera *driver* Rp 5 juta, dan sewa tiga *makrofon* klip Rp 900 ribu.

Biaya paling besar untuk jasa jurnis kamera, personel, dan desain video, total Rp 43 juta. Biaya ini untuk tiga jurnis kamera selama 30 hari dan satu videografer desain video. Amsal juga menagih biaya *memotret* video, *memotret* dan *finishing* masing-masing Rp 1 juta.

Pekerja ekonomi kreatif di bidang fotografi dan videografi di Medan, Dedi Sinu-haji, menyelvat kasus Amsal menandatangani perjanjian bagi pekerja ekonomi kreatif. "Negara seharusnya melindungi anak-anak muda para pekerja ekonomi kreatif, bukan malah mencari pasal untuk menjerakaninya," katanya.

Menurut Dedi, dakwaan JPPU sangat tidak berdasar. Jaksa mendasarkan kerugian negara berdasarkan pertanggung-jawaban yang tidak masuk akal. Perhitungannya dilakukan Inspektoriat Daerah Kabupaten Karo pada 2025.

Jaksa mengatakan, negara seharusnya tidak membayar biaya konsep dan ide Rp 2 juta, *makrofon* klip Rp 900.000, pergeditan video Rp 1 juta, pemotretan video Rp 1 juta, dan pergeditan suara Rp 5 juta. "Padahal, semua itu adalah proses ekonomi kreatif dan tidak merugikan buayanya nol," lanjutnya.

Dedi menyelvat, penang-guhan pembantuan Amsal tersebut menjadi angin segar bagi pekerja ekonomi kreatif.

Karakteristik berbeda

Suatu rapat dengan deputi di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (30/3), Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kawandura Lukstianto menyelvat perisik bujukan yang tidak meng-bayar ide kreatif dalam pembuatan video profil desa. "Padahal, nilai utama dari ekonomi kreatif adalah pada ide dan konsep."

Menyebut Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Hilmy menga-takan, pengadaaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda diwariskan dengan pengadaaan barang dan jasa biasa. "Kewenangan penilaian RFP (Rencana Pembelian) (RFP) jasa kreatif harus dilaku-kan secara obyektif dan ber-basis pertimbangan terhadap industri kreatif," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR, Hince Fransjairan, yang mendampingi Amsal saat penang-guhan pembantuan, memutar-kan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari rapat de-rasat produksi.

Setelah pembuatannya ditangguhkan, Amsal memotret hari dan kehidupannya di Karo. Dia tak kuasa membeberang nar mata saat meminagalkan Rumah Kelas I Medan. Dia akan menghadiri sidang pem-bacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pa-danan Negeri Medan, Riau (1/4).

Amsal berharap, majelis hakim memberikan putusan yang adil. "Saya percaya masa depan ekonomi kreatif akan terus berkembang. Saya akan berjuang sampai proses itu-kan. Dan, besok, saya akan tetap hadir dalam persidangan. Saya berharap, majelis hakim memberikan putusan bebas murni kepada saya," ungkapnya.



Pekerja industri kreatif Amsal Sitepu keluar dari Rumah Tahanan Kelas I Medan, Sumatera Utara, Selasa (31/3/2026). Amsal terjerat kasus korupsi pembuatan video profil desa. Pembuatannya ditangguhkan satu hari sebelum vonis dibacakan setelah mendapat dukungan dari publik.